

JURNAL SKRIPSI

M Gagah Dirgantara

(20130510167)

“Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Narkoba) di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan “

The efforts of the Government of Indonesia In dealing with transnational crime (drug smuggling) in Indonesia-Malaysia border areas in Kalimantan

*Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhamadiyah
Yogyakarta*

Jalan Lingkar Selatan, Kasiham, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia

dirgagagah88@gmail.com

Abstrak

Kejahatan Transnasional merupakan jenis kejahatan yang teroganisir dan melintasi batas Negara dalam melakukan kegiatannya, salah satu dari contoh kejahatan transnasional yang menggemparkan dan marak terjadi di banyak negara adalah kejahatan dalam penyelundupan narkoba, Indonesia adalah salah satu negara yang menerima dampak besar dari kejahatan penyelundupan narkoba ini, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami kerugian di banyak aspek mulai dari materi, sosial dan lainnya. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki banyak perbatasan negara yang sangat luas dari perbatasan laut hingga darat, menimbulkan kesulitan bagi Indonesia dalam untuk menangani kejahatan tersebut, oleh sebab itu Indonesia melakukan tiga skala kerjasama guna mengefisienkan hasil dalam memberantas aktivitas penyelundupan narkoba dan dampak yang ditimbulkan. Dalam pemhasan skripsi ini penulis akan

membahas perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan sebagai objek penelitian dikarenakan perbatasan tersebut merupakan salah satu tempat maraknya aktivitas penyelundupan dari kejahatan transnasional ini.

A. Pendahuluan

Berkembangnya berbagai bidang pada era globalisasi telah mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan dan akses, Pada kasus perbatasan negara, globalisasi telah mengkaburkan batas-batas yang dimiliki oleh negara. Batas-batas antar negara yang semakin kabur telah menyebabkan jalur lalu lintas batas negara semakin mudah untuk diakses.

Akses yang mudah dan bantuan teknologi yang semakin berkembang telah membuka jalur bagi mobilitas barang dan manusia antar negara. Perkembangan teknologi yang ada dan keadaan perekonomian yang ada di masyarakat telah menyebabkan munculnya aktor-aktor yang berusaha untuk memanfaatkan situasi yang ada dalam upaya memenuhi desakan perekonomian.¹ (oktarina, 2016)

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang cukup luas yang terbentang dari sabang sampai merauke. sehingga Indonesia mempunyai banyak wilayah perbatasan baik yang terletak di laut maupun yang ada di darat Diantara negara tersebut adapun negara yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah seperti: Australia, Filipina, India, Republik Palau, Singapura, Thailand, Vietnam. Dan negara yang berbatasan darat secara langsung dengan

¹ Dina Oktarina. KEJAHATAN LINTAS BATAS INDONESIA-MALAYSIA Studi tentang Trafficking In Persons Di Kalimantan Barat. 2016, hlm.2.

Indonesia seperti: Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste.² (Daftar Negara yang Berbatasan dengan Indonesia (Negara Tetangga Perbatasan), n.d.) Dengan posisi Indonesia yang demikian, Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus menjaga dan mengamankan wilayah perbatasannya dengan negara-negara tetangga ini dengan semaksimal mungkin guna kenyamanan dan keamanan bagi wilayah dan warga negara Indonesia, dan guna menghindari timbulnya berbagai masalah diperbatasan, seperti kegiatan pelanggaran dan kegiatan ilegal yang bisa merugikan Indonesia .

Dengan perbatasan yang banyak dan panjang ini Indonesia tentunya memiliki banyak kekurangan dalam berbagai macam hal sehingga mempermudah dalam actor kejahatan Transnasional dalam melakukan aktivitasnya, Sebagai contoh perbatasan Indonesia yang sering menjadi jalur bagi kejahatan transnasional adalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia yang terletak di pulau Kalimantan, merupakan surga bagi pelaku kejahatan atau kegiatan ilegal. Hal ini karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat berbagai aspek kekurangan yang menyebabkan atau mempermudah kejahatan transnasional ini marak terjadi.

Salah satu kejahatan Transnasional yang marak terjadi perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan adalah kejahatan penyelundupan narkoba, kejahatan ini menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak diperhatikan di dunia Internasional di karenakan kejahatan ini bukan hanya memberi ancaman bagi satu negara saja tetapi berdampak memberi ancaman pada kawasan dan bahkan global.

Dalam hal ini negara-negara yang mengalami kejahatan transnasional harus menemukan solusi dalam penanganan kasus-kasus tersebut dengan berbagai hal guna penanganan kasus yang

²<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-negara-yang-berbatasan-dengan-indonesia-negara-tetangga-perbatasan.html> di akses tanggal 7 oktober 2016

lebih efisien, karena memang kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya dianggap terlalu sulit ditangani apabila bertindak secara individu, terutama bagi Indonesia yang memiliki banyak kekurangan dalam untuk menangani kasus-kasus tersebut, dan untuk mengurangi kerugian dan efesiensi dalam penanganannya.

B. Kerangka Konseptual

konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep, *konsep keamanan nasional dan kerjasama internasional*

1. Kerjasama internasional

Kerjasama internasional Coplin dan Marbun:

*Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif.*³ (Simamora, 2016)

Kerjasama menurut ***Coplin dan Marbun*** ini menjelaskan bahwa kerjasama internasional awalnya terbentuk dari sebuah alasan dari negara dalam melakukan interaksi yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama guna melakukan pemecahan masalah yang secara kolektif, dalam kasus ini kerjasama yang terbentuk adalah dalam menangani kasus penyelundupan narkoba yang terus berkembang karena pengaruh globalisasi , yang berlangsung baik itu

³ Rebecca Simamora KERJASAMA AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO DALAM PENANGANAN MONEY LAUNDERING DARI MEKSIKO KE AMERIKA SERIKAT, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, hlm.733.

bilateral (Malaysia) ,regional (ASEAN) atau lebih luas lagi lewat lembaga maupun wadah yang memang di khususkan dalam penanganan kasus kejahatan narkoba tersebut guna mencapai pemecahan kasus bersama . Yang artinya dalam kasus kejahatan transnasional penyeludupan narkoba di perbatasan Indonesia di kalimantan Indonesia berusaha membangun interaksi baru berupa kerjasama baik secara bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia,regional atau pun global bersama dengan ASEAN dan wadah-wadah yang telah disediakan sesuai dengan bidang masing-masing,Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan menciptakan aktifitas atau gerakan yang berguna untuk memecahkan dan menaggulangi kejahatan transnasional penyelundupan Narkoba di perbatasan di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan.

2. Konsep keamanan nasional

Steven J. Main di dalam tulisannya yang berjudul Russia's New National Security Concept The Threat Defined, mengemukakan bahwa para ilmuwan Russia mendefinisikan keamanan nasional sebagai keamanan seseorang, masyarakat dan negara dari ancaman internal dan eksternal, stabilitas keamanan dari ancaman faktor perusak, karenanya maka keamanan nasional juga harus memelihara atau menjaga kondisi kehidupan dari ancaman internal dan eksternal tersebut untuk menjamin keselamatan; kemajuan menyeluruh dari masyarakat dan warga negara.⁴ (Letjen TNI Darmono, 2010)

⁴ Letjen TNI Bambang Darmono dkk, Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN NASIONAL,hlm.23.

dalam tulisan ini penulis mempersempit penggunaan konsep menggunakan keamanan nasional menurut pandangan modern sebagai konsep untuk menjelaskan penelitian yang penulis lakukan.

Keamanan nasional adalah sebuah sistem pemikiran atau pandangan tentang bagaimana menjamin keamanan dalam sebuah negara yang meliputi individu, masyarakat, dan negara dari ancaman internal dan eksternal, yang mana factor internal seperti ekonomi disuatu negara yang buruk sehingga memaksa terjadinya kejahatan transnasional ini seperti penipuan TKI yang di iming-imingi gaji yang besar diluar negeri sehingga terjadinya kasus perdagangan manusia, dan factor eksternal seperti serbuan masuknya barang-barang illegall dan ke sebuah negara seperti, narkoba, senjata illegal dan berbagai barang illegal lainnya yang tidak terbandung dan serbuan imigran gelap yang menjadi korban lain human trafficking, sehingga menjadi sebuah ancaman. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dan Malaysia yang memiliki jalur perbatasan yang rawan sebagai jalur kejahatan transnasional penyelundupan narkoba perlu melakukan sebuah upaya guna menjaga dan mengamankan keamanan nasional yang mereka miliki dengan membentuk kerjasama bilateral ataupun multilateral.

C. Metode Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yakni menggambarkan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan perkembangan dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan penanganan lewat kerjasama dengan Malaysia dan ASEAN dan Global dalam menangani kasus kejahatan Transnasional diperbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan

Data penelitian ini penulis diperoleh dari study pustaka (Library Research) dengan cara mengumpulkan berbagai materi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dari berbagai sumber yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, jurnal ilmiah, majalah, dan situs internet, yang berhubungan dengan kasus kejahatan transnasional diperbatasan Indonesia dan Malaysia dikalimantan terutama yang membahas penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia.

D. Pembahasan

1. Penyebab Penyelundupan Narkoba di Indonesia

Penyelundupan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat-sangat memprihatinkan karena jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh masalah ini mempunyai dampak yang sangat besar baik secara materi maupun non materi, masalah penyelundupan di Indonesia sendiri disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal.

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal atau penyebab dari luar dari masalah narkoba di Indonesia terletak pada posisi kawasan yang Indonesia diami saat ini yaitu kawasan Asia Tenggara atau kawasan ASEAN, kawasan ASEAN ini merupakan kawasan yang sangat strategis bagi actor kejahatan penyelundupan narkoba, selain posisi yang strategis untuk daerah transit dan lainnya kawasan ini terdiri dari negara-negara berkembang dan mempunyai populasi yang padat, negara berkembang cenderung lebih mudah di masuki oleh penyelundup narkoba dan populasi negara berkembang biasanya relative lebih besar dari negara maju sehingga bisa di jadikan sebagai pasar bagi narkoba-narkoba tersebut.

Faktor eksternal lainnya adalah di kawasan ASEAN ini terdapat sebuah tempat yang disebut dengan nama golden triangle yang mana tempat ini merupakan salah satu gudang dan

penghasil narkoba terbesar di dunia yang menyuplai 60% opium di dunia, sehingga menyebabkan kawasan ini sangat rawan bagi penyelundupan narkoba.

b. Faktor Internal

Selain faktor eksternal faktor lainnya yang menyebabkan Indonesia sebagai sarang bagi penyelundupan narkoba terdapat dari dalam, yang di mulai dari sarana prasarana infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia di perbatasan Indonesia maupun sarana masuk seperti pelabuhan dan bandara yang kurang memadai, SDM yang di tugaskan kurang terlatih dan kekurangan personil dalam melakukan pengamanan serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga daerah tempat tinggal mereka akan bahaya narkoba, dan masalah populasi di Indonesia yang terbilang terbesar di ASEAN yang menjadikan daya Tarik lainnya.

2. Masalah yang Diakibatkan Narkoba di perbatasan Indonesia dan Malasia di Perbatasan Kalimantan

Di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Indonesia memiliki Tiga provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, diantaranya yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, di tiga provinsi kasus-kasus penyelundupan narkoba dan dampaknya cenderung besar, dampak dari narkoba di perbatasan ini sendiri seperti masalah sosial dan masalah kesehatan, di provinsi Kalimantan Barat tingkat HIV aid cenderung tinggi dan penyebab kedua terbesar adalah narkoba, di Kaltim daerah provinsi ini menjadi kawasan pengguna narkoba terbesar kedua di Indonesia dan di Kalimantan Utara terdapat banyak pengguna dibawah umur dan usia produktif kerja yang tinggi yang nantinya di khawatirkan akan merusak generasi pemuda di wilayah tersebut

3. Pembentukan Kerjasama Internasional Sebagai Salah Upaya Menangani Masalah Penyelundupan Narkoba

masalah penyelundupan dan penyebaran narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, hal ini diakrenakan kegiatan drugs trafficking merupakan kejahatan yang dihadapi dalam skala skala transnasional, oleh sebab itu negara-negara didunia melakukakn bebagai kegiatan kerjasama guna untuk menaggulangi masalah tersebut, dalam studi kasus yang ingin penulis teliti penulis hanya akan menitik beratkan pada lembaga yang melakukan kerjasama dengan Indonesia dan kegiatan yang dilakukan dalam mebangun kerjasama tersebut. Dalam upayanya untuk menangani dan mengurangi penyelundupan di perbatasan di Kalimantan Indonesia melakukan berbagai kerjasama dan kegiatan seperti selalu aktif dalam forum-forum internasional di regional ASEAN, serius ikut dalam kelembagaan di ASEAN yang menangani masalah narkoba, dan melakukan pendekatan dengan negara-negara tetangga, semua hal itu guna membantu dalam menangani masalah narkoba yang terjadi di Indonesia sendiri. Berikut bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dalam upayanya menangani dan mengurangi dampak penyelundupan narkoba ini.

4. Kerjasama Internasional Dalam Menangani Masalah Penyelundupan dan Penyebaran Narkotika di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Dalam untuk menangani masalah penyelundupan dan penyebarab narkoba di perbatasan indonesia di Kalimantan Indonesia membentuk Tiga skala kerjasama yaitu mulai scope terkecil bilateral, regional hingga kerjasama skala globa guna memperoleh hasil yang effisien dalam menangani kasus tersebut:

A. Kerjasama Indonesia dan UNODC

Dalam melakukan pemberantasan narkoba salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dalam membentuk kerjasama internasional dalam skala global, kerjasama dalam skala global yang dilakukan oleh Indonesia adalah membentuk kerjasama dengan organisasi seperti PBB melalui lembaga-lembaga yang berada dibawah naungan organisasi pemerintah dunia tersebut.

Salah satu lembaga yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa ini yang bertanggung jawab dalam masalah narkoba dan obat-obatan terlarang dan kejahatan seperti kejahatan transnasional lainnya adalah United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC).

UNODC membantu Indonesia melalui program Country Programme Indonesia, dalam isi Country Programme Indonesia yang di setujui pada 31 januari 2012, Country Programme Indonesia ini merupakan program kerja yang di tangani oleh UNODC dan dibagi menjadi lima sub program kerja: (1).Kejahatan Transnasional dan perdagangan gelap,(2) anti korupsi,(3) anti terorisme,(4) keadilan,(5) masalah penanganan narkoba dan masalah HIV AIDS dengan nilai program yang mencapai lebih dari US \$ 27 juta.⁵ (UNODC, 2012)

Dari lima sector fiatas bantuan UNODC yang bersengkutan dengan masalah yang bersengkutan dalam masalah Indonesia pada kejahatan penyelundupan narkoba dan dampaknya di perbatasan Kalimantan terdapat di dua sector yaitu sector 1 dan 5.

Bentuk dukungan yang di berikan UNODC terhadap pemerintah Indonesia dapat di lihat dari 3 sektor bantuan :

⁵https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/indonesia/publication/Country_Programme_Indonesia.pdf, diakses pada 5 oktober 2017

1. Bantuan Teknis dan Pemberian Saran⁶ (Fadillah, 2015)

Pada sektor ini UNODC memberikan bantuan pada Indonesia berupa teknis dan pelatihan seperti:

- a. Melakukan pelatihan terhadap pihak kepolisian
- b. UNODC dalam menangani masalah HIV aid akibat jarum suntik
- c. UNODC melakukan pendekatan terhadap masyarakat

2. Pemantauan dan Pelaporan

UNODC berusaha dalam mengawasi dan memberikan solusi secara awal dalam masalah yang bersangkutan dengan narkoba di Indonesia, memberikan dukungan dengan focus pada kebijakan dan saran strategis dalam mengembangkan kebijakan dan strategi nasional.

3. Bantuan Keuangan⁷

Dalam masa;ah keuangan dala, ntul menjalamlam setiap program dalam mnangani masalah yang bersangkutan dengan kejahatan narkoba UNODC memberi keuangan dan membantu mencari sponsor dalam menjalankan aktivitas tersebut.

B. Kerjasama Indonesia dan ASOD

Dalam skala regional Indonesia terbilang sangat aktif dalam melakukan hubungan kerjasama dalam masalah penanganan hal yang bersangkutan dengan narkoba, hal ini terlihat dari keaktifan Indonesia dalam keanggotaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN dalam menangani masalah narkoba, seperti contohnya dalam keanggotaan ASEAN membentuk Asean Senior

⁶Rizki Sari Fadillah Oktober 2015 JOM FISIP Volume 2 No.2 Page 1 UPAYA UNODC (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME)DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA,hlm.10.

⁷ ibid

Official on Drugs Matters (ASOD), ASOD merupakan lembaga lembaga khusus yang dimiliki oleh ASEAN dalam menangani masalah yang bersangkutan dengan masalah narkoba bagi negara-negara ASEAN.

Keterlibatan Indonesia sendiri dalam ASOD tak lepas dari keuntungan dari keanggotaan ASOD, yang telah dijelaskan pada 8 peran ASSOD, yang mana salah satunya membantu dalam membentuk kerjasama anggota ASOD dengan pihak ketiga, dan juga Indonesia memanfaatkan ASOD sebagai sarana Indonesia dalam menu-yuarakan kepentingannya dalam setiap pertemuan yang dilakukan oleh ASOD guna menarik bantuan dan simpati dalam penanganan masalah narkoba.

Sejauh ini salah satu pemikiran dari kelahiran ASOD sendiri adalah tercetusnya Drugs Free ASEAN oleh negara-negara ASEAN yang mana hal ini meningkatkan motivasi bagi negara-negara ASEAN tersebut dalam membangun kerjasama sama guna untuk pencapaian tersebut.

ASOD sebagai lembaga di ASEAN yang secara khusus menangani masalah narkoba tidak secara langsung berperan dalam melakukan penanganan narkoba di lapangan, hal ini dikarenakan perananan ASOD secara umum. Secara umum, peran ASOD berisikan tiga variabel utamanya; *kebijakan, pendekatan, dan strategi*. **Kebijakan** sebagai penyalur negara ASEAN untuk melakukan sebuah pandangan, tindakan, dan strategi dalam penanganan narkoba baik dalam tingkat nasional, regional dan internasional, dengan memberdayakan lembaga lainnya yang mengatasi masalah yang sama seperti NGO. **Pendekatan** sebagai sebuah komponen yang menjadi pendorong bagi negara-negara di ASEAN untuk dapat sesegara mungkin melakukan sebuah pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang didalam mengatasi masalah narkoba yang berikutnya harus tergambar dalam sebuah implementasi program-program

dan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan *strategi* merupakan bagian terakhir yang bertujuan merekomendasikan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persediaan atau peredaran dan permintaan serta mempertegas sistem pengawasan legalnya.⁸ (Ramadhani, 2016)

C. Kerjasama Indonesia dan Malaysia

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia sendiri seperti terjadinya penandatanganan MOU dalam penanganan narkoba di perbatasan dan melakukan kegiatan – kegiatan bersama dalam menangani masalah tersebut.

Dalam beberapa decade penyebaran dan penyelundupan narkoba di Indonesia dan Malaysia telah mencapai taraf yang serius, walaupun kedua negara telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penanganan dalam skala nasional tentu dirasa belum cukup untuk mempersempit kegiatan-kegiatan dan masalah yang berbau kejahatan peredaran dan penyelundupan narkoba ini. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia –Malaysia dalam penanggulangan narkoba di seluruh wilayahnya telah dilakukan dengan berbagai macam upaya, seperti dilakukan pencegahan, hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian dan pengembangan, serta pematapan kelembagaan.⁹

Indonesia dan Malaysia Kerjasama yang dijalin antar pihak tersebut meliputi :¹⁰

a) Polisi Republik Indonesia (POLRI) – Polisi Diraja Malaysia (PDRM):

Lembaga Kepolisian kedua negara sepakat menyelenggarakan kegiatan operasional dan kegiatan investigasi bersama guna mencapai penanganan yang lebih efisien dalam kasus

⁸Hardi Ramadhani KEBIJAKANASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS (ASOD) MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA(2009-2013),hlm.5.

⁹*ibid*

¹⁰ *ibid*

narkoba, melakukan pengembangan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki aparat penegak hukum di kedua negara, melakukan kerjasama dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk membantu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum agar menjadi lebih optimal.

b) Badan Narkotika Nasional(BNN) – Agensi Anti Dadah Kebangsaan(AADK):

melakukan kegiatan pertukaran informasi Intelijen antara lembaga khusus seperti BNN dan AADK dan melibatkan aparat penegak hukum di kedua negara, serta melakukan kerjasama dalam menangani masalah yang bersangkutan tentang efek dari narkoba seperti penanganan masalah pecandu dan pemulihan dan pengobatan, melakukan penanganan bersama mengenai isu-isu yang bersangkutan tentang masalah penyelundupan dan masalah narkoba lainnya.

c) Gerakan Nasional Anti Narkoba(GRANAT) –Persatuan Mencegah Dadah Malaysia(PEMADAM) –PENGASIH:

Bersama dengan penegak hukum LSM di kedua negara yang melakukan melakukan pemberantasan narkoba dengan cara mereka sendiri seperti melakukan kegiatan-kegiatan sosial, melakukan peng edukasian terhadap kaum muda dan masyarakat umum akan bahaya dari pemakaian narkoba melakukan kegiatan pelayanan dan pengobatan terhadap pecandu, saling tukar informasi antar lembaga-lembaga tentang masalah penanganan narkoba dan lainnya.

Dalam kasus perbatasan Kalimantan sendiri manfaat kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam upaya penanganan penyelundupan antara kedua negara adalah dengan melakukan kegiatan nyata dilapangan, contoh melakukan Razia gabungan dalam mengatasi penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia, pelatihan bersama guna meningkatkan kualitas SDM dalam upaya penjagaan perbatasan dan lainnya yang diharapkan akan mendapatkan hasil langsung yang lebih memuaskan di kedua belah negara.

E. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara salah satu negara yang menjadi korban dalam penyelundupan narkoba hal ini menyebabkan Indonesia kewalahan dalam menangani kejahatan ini. Karena masalah yang sangat memprihatinkan ini pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dalam melakukan penanganannya agar penyelesaian masalah tersebut menjadi lebih efisien, skala kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia sendiri dalam masalah ini dibagi menjadi tiga skala kerja sama, yaitu skala global (UNODC) skala regional (ASOD) dan skala bilateral (Malaysia).

Tiga kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dalam skala regional dengan ASOD tidak melakukan kegiatan langsung kelapangan, kerjasama yang dilakukan lebih pada bantuan seperti pelatihan dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh penyelundupan narkoba lewat pelatihan rehabilitasi korban dan penyelesaian masalah lewat memberikan resolusi masalah kenegaraan-negara bersangkutan dan menjadi tempat untuk membangun kerjasama lain dengan berbagai pihak dalam penanganan masalah narkoba tersebut.

Kerjasama lainnya dalam skala global dengan UNODC dinilai lebih kompleks dalam penanganan masalah penyelundupan narkoba karena aspek yang lebih jelas dalam melakukan prospek kerjasama, dari program kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak terbentuk program kerjasama yaitu program kerjasama *negara Indonesia* yang mana terdapat lima sub aspek dalam kerjasama ini dan dari lima sub aspek kerjasama terdapat dua aspek yang bersangkutan dalam penyelesaian kejahatan transnasional dan penyelesaian masalah narkoba lainnya.

Dalam skala bilateral kerjasama yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah kebanyakan memang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan seperti melakukan sosialisasi

terhadap masyarakat terutama masyarakat di perbatasan, melakukan pertukaran informasi antara lembaga seperti kepolisian dan lembaga bersangkutan lainnya, melakukan kerjasama dengan operasi gabungan dalam mengamankan daerah perbatasan dll, namun yang disesali kerjasama yang dapat dilakukan hanya sebatas itu saja tidak dapat dikembangkan ke tahap lebih dalam di karenakan masalah hukum yang dihadapi negara masing-masing.

Dengan terbentuknya tiga skala kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia ini Indonesia mengharapkan dapat membantu mengoptimalkan dalam melakukan penanganan dalam masalah penyelundupan narkoba di perbatasan dan dampak dari penyelundupan narkoba seperti pada masalah kesehatan dalam penangan rehabilitasi dan masalah penyebaran HIV AIDS dan penyakit yang disebabkan narkoba lainnya di Indonesia dan perbatasan Kalimantan. Selain pada masalah kesehatan diharapkan kerjasama ini bisa menangani masalah sosial yang disebabkan oleh penggunaan narkoba dengan membantu melakukan pendekatan kepada masyarakat dan para pengguna narkoba di Indonesia dan perbatasan Kalimantan.

Pada pembahasan isi dari penelitian yang penulis sampaikan, Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak permasalahan yang bersangkutan dengan kejahatan transnasional terutama dalam masalah penyelundupan narkoba, membentuk berbagai macam kerjasama guna untuk menangani masalah penyelundupan narkoba tersebut, kerjasama yang dilakukan sendiri dengan berbagai skala kerjasama mulai dari bilateral dengan Malaysia, dari regional ASEAN dengan komite penanganan masalah narkoba kawasan tersebut ASOD, dan dalam skala lebih besar lagi dengan lembaga dibawah naungan PBB yaitu UNODC, yang mana dalam tiga skala kerjasama ini Indonesia mendapatkan berbagai keuntungan mulai dari bantuan dalam penanganan dari penyelundupan narkoba dan penanganan dampak dari narkoba itu sendiri.

Daftar Pustaka

Daftar Negara yang Berbatasan dengan Indonesia (Negara Tetangga Perbatasan). (n.d.).

Retrieved from ILMU PENGETAHUAN Situs Belajar Online:

<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-negara-yang-berbatasan-dengan-indonesia-negara-tetangga-perbatasan.html#.WhWQPHmIbIV>

Fadillah, R. S. (2015). UPAYA UNODC (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME)DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA. *JOM FISIP Volume 2 No.2* , 10.

Istiqomah, R. N. (2016). STRATEGI HUBUNGAN INDONESIA DENGAN MALAYSIADALAM MEWUJUDKAN DRUG FREE ASEAN. *Journal of International Relations*, 115.

Letjen TNI Darmono, B. (2010). *Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

oktarina, D. (2016). Kejahatan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Study tentang Trafficking In Persons Di Kalimantan Barat. 2.

Ramadhani, H. (n.d.). KEBIJAKANASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS (ASOD) MENANGGULANGI DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA(2009-2013). 5.

Simamora, R. (2016). KERJASAMA AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO DALAM PENANGANAN MONEY LAUNDERING DARI MEKSIKO KE AMERIKA SERIKAT. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 733.

UNODC Country Programme Indonesia 2012-2015. (n.d.). Retrieved from

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/indonesia/publication/Country_Programme_Indonesia.pdf

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul:

**Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional
(Penyelundupan Narkoba) di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan**

M. GAGAH DIRGANTARA

20130510167

Yang Disetujui



Wahyuni Kartikasari, S.T., S.IP., M.Si.

Dosen Pembimbing